



RENCANA STRATEGIS



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan - undangan yang berlaku dan tepat pada waktunya. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dimana Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan urusan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terwujudnya Pembangunan untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang sinergi, koordinatif dan saling melengkapi.

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah memuat Analisis Gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, penyusunan strategis arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Restra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan efektifitas pelaksanaannya. Ucapan terimakasih dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya agar terselesaikannya laporan kinerja ini. Semoga dokumen ini bermanfaat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah guna mencapai tujuan dan sasaran pokok melalui Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan. Demikian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, serta memberi dampak positif bagi kemajuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 25 September 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



ABDUL HARIS KARIM, ST., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700422199303 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur	6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	23
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.2.2 Isu Strategis.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1 Tujuan.....	38
3.2 Sasaran.....	38
3.3 Strategi.....	38
3.4 Arah Kebijakan.....	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1 Uraian Program.....	44
4.2 Uraian Kegiatan	44
4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	68
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	89
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	94

RENSTRA 2025 – 2029

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	94
BAB V P E N U T U P	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	15
Tabel 2.2	15
Tabel 2.3	16
Tabel 2.4	16
Tabel 2.5	17
Tabel 2.6	17
Tabel 2.7	18
Tabel 2.8	19
Tabel 2.9	21
Tabel 2.10	23
Tabel 2.11	32
Tabel 3.1	38
Tabel 3.2	40
Tabel 3.3	42
Tabel 3.4	43
Tabel 4.2	46
Tabel 4.3	68
Tabel 4.4	89
Tabel 4.5	94
Tabel 4.6	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14
Gambar 2.2 Diagram Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Peraturan ini mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Renstra disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun. Renstra harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rencana kerja dan mengalokasikan anggaran. Penyusunan Renstra menekankan pada pendekatan partisipatif, terintegrasi, dan akuntabel, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan kewenangan pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan baik di perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman pesisir kedepan akan semakin rumit. Oleh karena itu, maka untuk menjawab dan meghadapi tantangan ke depan perlu di susun

sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman Dan Pertanian. Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal, peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian. Kondisi tersebut menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian melalui penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang No. 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 16/2004 Tentang Penatagunaan Tanah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah (PP) No. 88/2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm)
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Presiden No. 71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Sebagaimana Telah Dirubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden 71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Presiden No. 18/2016 Tentang Perangkat Daerah;

12. Pemendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 di ubah menjadi Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 , Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Kemendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
17. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai arahan dan pedoman perangkat daerah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan Perumahan Permukiman dan Pertanahan dengan sasaran mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan infrastruktur Perumahan Permukiman perkotaan

dan pedesaan serta Pertanahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah;
4. Memudahkan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2025-2029;
2. Tersusunnya acuan dan pedoman bagi seluruh bidang-bidang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan yang merupakan dokumen perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksanaan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Kepala dinas memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, serta melaksanakan urusan di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi, antara lain:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Perumahan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pertanahan, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengendalian teknis pembangunan serta membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dalam menyelenggaraan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Layanan Umum Perumahan dan Permukiman, dan Pertanahan.

2. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas; dan
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

a. Sub Bagian Perencanaan Program.

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan Dinas;
9. Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;

10. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. Melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

3. Kepala Bidang Perumahan.

Bidang Perumahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Perumahan mempunyai fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitasi Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;

1. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Perumahan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitas Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
3. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitas Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
4. Pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitas Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Fasilitas Penyediaan Rumah Masyarakat, dan Pembinaan dan Relokasi Program Penyediaan Rumah;
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Kawasan Permukiman. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Kawasan Permukiman;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
4. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pembinaan Penataan Kawasan Permukiman, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman;
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

5. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.

Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi mempunyai fungsi;

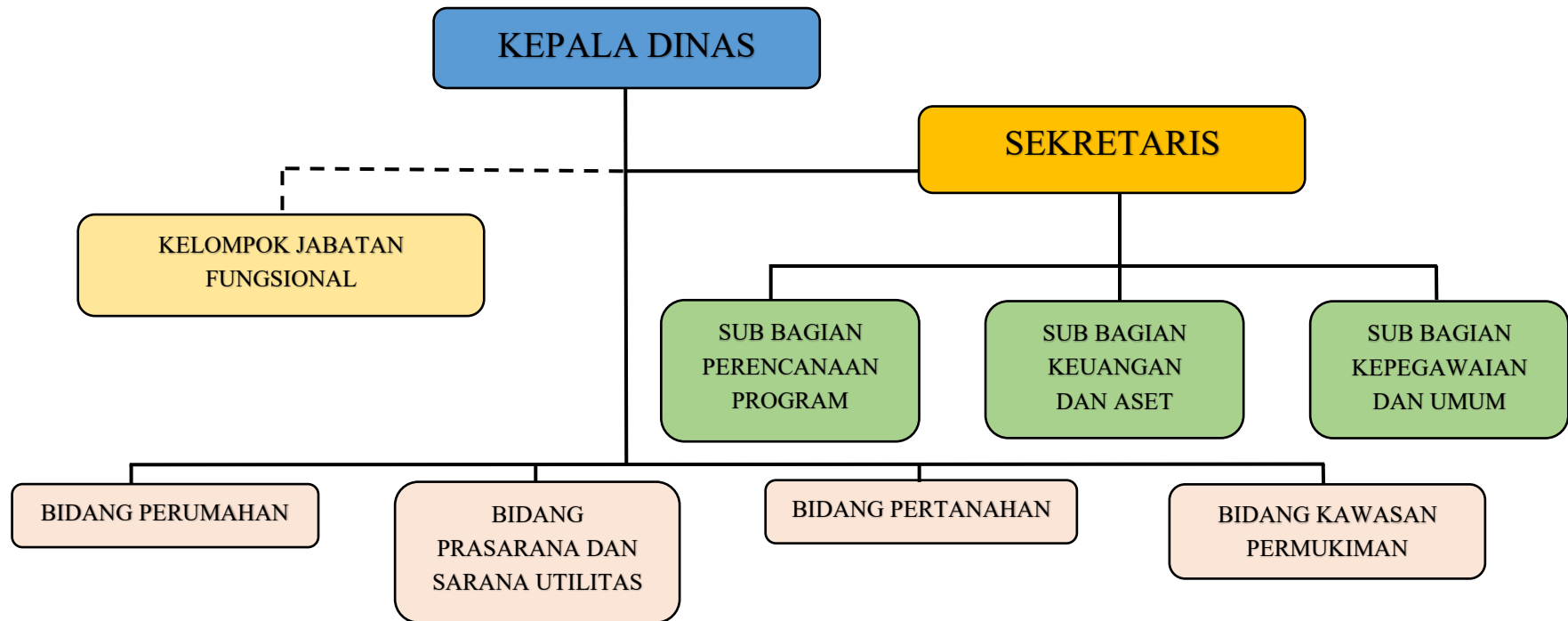
1. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
4. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Umum, Pembinaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum, dan Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
7. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi.

6. Kepala Bidang Pertanahan.

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah. Dalam menyelenggaraan tugas pada Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pertanahan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
4. Pembinaan/bimbingan teknis di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah, penetapan Lahan dan penerbitan izin lokasi, dan Penyediaan Tanah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

Gambar 2.1 Gambar Pelayanan Perangkat Daerah



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah hingga akhir Juli 2025 singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

PEGAWAI NEGERI SIPIL	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV					TOTAL
	IA	IB	IC	ID	IIA	IIB	IIC	IID	IIIA	IIIB	IIIC	IIID	IVA	IVB	IVC	IVD	IVE	
SEKRETARIAT	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	5	5	3	-	1	-	-	19
BIDANG PERUMAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	-	-	-	-	10
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	2	1	-	-	-	13
BIDANG PSU	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	3	4	2	-	-	-	-	17
BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	2	1	-	-	-	10
JUMLAH																		69

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

Tabel 2. 2 Jumlah PPPK Berdasarkan Golongan

PPPK	GOLONGAN V	GOLONGAN VII	GOLONGAN IX	TOTAL
SEKRETARIAT	-	-	15	15
BIDANG PERUMAHAN	2	-	9	11
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	1	-	8	9
BIDANG PSU	2	2	12	16
BIDANG PERTANAHAN	2	2	12	16
JUMLAH				67

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

Tabel 2. 3 Jumlah PNS dan NON PNS Berdasarkan Pendidikan

PEGAWAI		SMP	SMA/ SMK	D3		S1		S2		S3	JUMLAH
				TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK	TEKNIK	NON TEKNIK		
SEKRETARIAT	PNS	1	2	1	2	1	8	1	3		19
	PPPK	-	-	-	-	-	15	-	-		15
	NON PNS	-	16	-	-	-	9	-	-		25
BIDANG PERUMAHAN	PNS	1	-	-	-	6	-	2	1		10
	PPPK	-	2	-	-	8	1	-	-		11
	NON PNS	7	-	-	-	10	-	-	-		17
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	PNS	-	-	1	-	5	2	3	2		13
	PPPK	-	1	-	-	8	-	-	-		9
	NON PNS	-	10	1	-	9	3	-	-		23
BIDANG PSU	PNS	-	-	7	-	3	2	4	1		17
	PPPK	-	2	2	-	10	2	-	-		16
	NON PNS	-	7	1	-	19	-	1	-		28
BIDANG PERTANAHAN	PNS	-	-	-	-	5	2	-	2	1	10
	PPPK	-	2	-	2	-	12	-	-		16
	NON PNS	-	2	-	-	-	3	-	-		5

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

Tabel 2. 4 Jumlah PNS dan NON PNS Berdasarkan Agama

PEGAWAI		AGAMA		
		ISLAM	KRISTEN	HINDU
SEKRETARIAT	PNS	16	3	-
	PPPK	13	2	-
	NON PNS	21	4	-
BIDANG PERUMAHAN	PNS	10	-	-
	PPPK	11	-	-
	NON PNS	16	1	-
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	PNS	13	-	-
	PPPK	9	-	-
	NON PNS	22	1	-
BIDANG PSU	PNS	13	2	2
	PPPK	15	1	-
	NON PNS	24	4	-
BIDANG PERTANAHAN	PNS	10	-	-
	PPPK	16	-	-
	NON PNS	5	-	-

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

Tabel 2. 5 Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin

PEGAWAI		JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
SEKRETARIAT	PNS	12	7
	PPPK	5	10
	NON PNS	11	7
BIDANG PERUMAHAN	PNS	5	5
	PPPK	7	4
	NON PNS	14	10
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	PNS	6	7
	PPPK	5	4
	NON PNS	13	10
BIDANG PSU	PNS	13	4
	PPPK	9	7
	NON PNS	13	16
BIDANG PERTANAHAN	PNS	7	2
	PPPK	8	8
	NON PNS	4	1

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

B. Asset

Sarana dan Prasarana digunakan oleh Dinas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Maka setiap ASN yang bekerja dilengkapi dengan peralatan yang mendukung kinerja. Peralatan yang dimaksud adalah sarana seperti komputer beserta kelengkapannya dan juga software-software pendukungnya. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki asset bergerak dan tidak bergerak yang terinci sebagaimana terdapat dalam **tabel 2.6** dan **tabel 2.7** berikut:

Tabel 2. 6 Asset Bergerak

Nama Bidang/ Sekretariat	Aset Bergerak			
	Roda 4		Roda 2	
	Baik	Rusak	Baik	Rusak
Sekretariat	5	-	13	3
Bidang Perumahan	1	-	8	-
Bidang Kawasan Permukiman	1	-	7	-
Bidang PSU	1	-	8	-
Bidang Pertanahan	1	-	5	-
JUMLAH	9	-	41	3

Sumber Data: Pengurus Barang Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

Tabel 2. 7 Asset Tidak Bergerak

Nama Bidang/ Sekretariat	Asset Tidak Bergerak													
	Tanah	Bangunan	PC		Laptop		Printer		Projektor		AC		TV	
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
Sekretariat	-	-	31	-	25	-	33	-	-	-	14	4	7	-
Bidang Perumahan	-	-	10	-	5	-	10	-	3	-	12	3	1	-
Bidang Kawasan Permukiman	-	-	9	3	6	-	22	-	-	-	9	1	-	-
Bidang PSU	-	-	13	-	4	-	13	-	-	-	10	3	-	-
Bidang Pertanahan	-	-	5	-	1	-	4	-	-	-	8	2	-	-
JUMLAH	-	-	68	3	41	-	82	-	3	-	53	13	-	-

Sumber Data: Pengurus Barang Sub Bagian Keuangan dan Asset Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 58 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi yang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan perencanaan anggaran yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	42,32	65,7	89,4	89,83	42,32	48,56	100	89,83	1,00	1,35	0,89	1,00
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda provinsi yang memperoleh fasilitas rumah layak huni	4,00	5,00	5,00	10,00	4,00	5,00	5,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Persentase Luas Permukiman Kumuh 10-15 ha yang tertangani	1,21	8,64	10,55	12,43	1,21	4,68	8,21	7,72	1,00	1,85	1,29	1,61
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	12,54	13,04	13,78	14,68	12,54	19,88	19,33	15,67	1,00	0,66	0,71	0,94

Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi	11,72	19,61	-	-	11,72	19,61	-	-	1,00	1,00	-	-
Persentase fasilitasi urusan pertanahan	-	-	58,93	-	-	-	58,94	-	-	-	1,00	-
Tingkat tata kelola pertanahan yang tertib	-	-	-	62,01	-	-	-	62,01	-	-	-	1,00

Gambar 2.2 Diagram Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah



Pada **Tabel 2.8 dan Gambar 2.2** diatas dapat dilihat bahwa untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Pada Tahun 2021-2024, untuk Indikator Persentasi Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada tahun 2021 sebesar 42,32%, pada tahun 2022 sebesar 48,56%, pada tahun 2023 sebesar 100%, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan pencapaian sebesar 89,83%. Untuk Indikator Persentasi Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemda Yang Memperoleh Fasilitas Rumah Layak Huni terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar 4%, pada tahun 2022 sebesar 5%, pada tahun 2023 sebesar 5% dan tahun 2024 sebesar 10%. Untuk indikator Persentase Luas Permukiman Kumuh 10-15 ha Yang Tertangani pun mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 1,21%, pada tahun 2022 sebesar 4,68%, pada tahun 2023 sebesar 8,21 dan pada tahun 2024 sebesar 7,72. Untuk Indikator Persentase Satuan Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU pada tahun 2021 sebesar 12,54, pada tahun 2022 sebesar 19,88, pada tahun 2023 sebesar 19,33 dan pada tahun 2024 sebesar 15,67.

Adapun pada urusan pertanahan indikator kinerja utama berubah nomenklatur pada tahun 2023 dan 2024, menjadi Indikator **Tingkat tata kelola pertanahan yang tertib** dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 62,01%.

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian Program	Anggaran Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Pengembangan Perumahan	7.367.272.846,00	9.433.106.389,00	2.532.249.000,00	10.588.243.216,00	6.801.216.556,00	8.880.729.416,00	2.445.156.769,00	10.278.060.670,00	0,92	0,94	0,97	0,97
Program Kawasan Permukiman	24.051.605,070	30.173.182.807,00	53.863.090.150,00	47.231.207.856,00	23.858.404.002,00	30.040.099.578,00	53.434.037.599,04	46.832.119.357,00	0,99	0,99	0,99	0,99
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	18.403.331.387	33.350.324.544,00	77.547.446.115,00	66.944.784.521,99	15.922.415.538,08	33.077.038.534,84	76.303.847.503,32	65.926.042.735,00	0,86	0,99	0,98	0,98
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	135.132.000,00	108.450.500,00	97.856.900,00	113.295.350,00	126.545.000,00	93.215.627,00	92.978.350,00	112.475.150,00	0,93	0,86	0,95	0,99
Program Pengelolaan Izin Lokasi	144.402.300,00	88.882.650,00	-	-	132.661.950,00	79.303.127,00	-	-	0,92	0,89	-	-
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Absentee	-	99.145.550,00	78.999.150,00	152.617.550,00	-	94.643.100,00	75.202.500,00	147.354.375,00	0,86	0,95	0,95	0,97
Program Penatagunaan Tanah	143.421.200,00	133.905.550,00	111.925.000,00	68.304.550,00	137.672.800,00	125.172.960,00	-	68.235.300,00	0,96	0,95	-	0,99

Berdasarkan **Tabel 2.9** diatas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi penyerapan anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang secara umum sasaran strategisnya yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Disperkimtan sampai dengan Tahun 2025 belum semua dapat dicapai sesuai target namun Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah berupaya dengan seoptimal mungkin agar dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi penyerapan anggaran untuk sasaran strategis Disperkimtan dipengaruhi dengan berbagai macam permasalahan dan faktor. Adapun permasalahan tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Permasalahan yang bersumber dari internal Perangkat Daerah, masalah internal yang sebagian besar terjadi pada PD pengguna anggaran antara lain adalah :
 - a. faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
 - b. Terdapat kekurangan alokasi biaya untuk melakukan pengawasan teknis di lapangan sesuai jangka waktu pelaksanaan konstruksi yang belum didukung dengan standar pembiayaan yang diinput dalam system DPA,
 - c. satuan harga yang ditetapkan sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil, keterlambatan mengusulkan standar biaya khusus,
 - d. estimasi jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan,
 - e. ketersediaan SDM yang belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas.
2. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa faktor penyebab yang disebabkan dalam tahap pengadaan barang dan jasa antara lain meliputi:
 - a. spesifikasi teknis barang/jasa tidak ada atau kurang jelas;
 - b. biaya di lapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus (mengakibatkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, menjadi temuan auditor);
 - c. banyaknya sanggahan dalam proses lelang;
 - d. banyaknya pengaduan LSM ke Polri dan Kejaksaan;
 - e. masalah pengadaan/ pembebasan lahan/tanah;
 - f. kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil Tindakan;
 - g. masih kurangnya tenaga teknis pengawas yang memiliki kualifikasi;
3. Dokumen pelaksanaan anggaran dan proses revisi, permasalahan yang muncul bersifat legal administratif. Seperti, rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan TOR, RAB, data pendukung, usulan kegiatan yang dibatasi, serta kegiatan yang memerlukan izin kontrak tahun jamak (multiyear) belum dilengkapi dokumen pendukung.
4. Permasalahan lainnya faktor-faktor lain yang menyebabkan proses penyerapan lambat antara lain adalah :
 - a. indikator kinerja utama tidak sinkron atau tidak sesuai dengan program kegiatan, atau ada indikator kinerja yang tidak tertuang dalam renstra tetapi memiliki program kegiatan dan pembiayaan,
 - b. kegiatan yang memerlukan dasar hukum dalam pelaksanaannya,

- c. kegiatan yang bersinggungan/serupa dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta
- d. alokasi anggaran dari pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi belum secara langsung mendukung pencapaian target indikator kinerja.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Kelompok Sasaran Layanan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemda dan PD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Pemda dan PD
b.	Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Pemda dan PD
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemda dan PD
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Pemda dan PD
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Pemda dan PD
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemda dan PD
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemda dan PD
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemda dan PD

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Korban Bencana yang Mendapatkan Rumah Layak Huni	Masyarakat Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah
a.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Kepala Keluarga Korban Bencana yang Mendapatkan Rumah Layak Huni	
b	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Provinsi		
c.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
d.	Pendistribusian dan Serah terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
3	Program Kawasan Permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Masyarakat Yang Berada di Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh
a.	Penataan Kawasan Permukiman Dengan Kumuh Denga Luas 10 (Sepuluh) HA Sampai Dengan di Bawah 15 (Lima Belas) HA	Jumlah Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15(Lima Belas) Ha	
b.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) HA Sampai Dengan dibawah (Lima Belas) HA	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan di Bawah 15(Lima Belas) Ha	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	persentase redistribusi tanah Objek Reforma Agraria	Orang/Badan Hukum yang mengajukan izin lokasi
a	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu (1) daerah Provinsi		
2	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan absentee	Persentase sengketa tanah garapan	Pemda dan PD yang melakukan konsultasi
a	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase sengketa tanah garapan	Pemda dan PD yang melakukan konsultasi
3	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi rencana penggunaan tanah (dokumen)	Pemda dan PD
a	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Persentase Dokumen Penetapan Lokasi yang sesuai ketentuan	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	persentase redistribusi tanah Objek Reforma Agraria	Orang/Badan Hukum yang mengajukan izin lokasi
a	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu (1) daerah Provinsi		
2	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan absentee	Persentase sengketa tanah garapan	Pemda dan PD yang melakukan konsultasi
a	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase sengketa tanah garapan	Pemda dan PD yang melakukan konsultasi
3	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi rencana penggunaan tanah (dokumen)	Pemda dan PD
a	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Persentase Dokumen Penetapan Lokasi yang sesuai ketentuan	

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur 57 tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tentang 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam susunan organisasi terdiri dari Kepala dinas, sekretaris, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman , bidang PSU/sertifikasi dan bidang pertanahan telah dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan perangkat organisasinya, hal ini didasarkan pada uraian tugas dan fungsi yang ada dalam struktur tersebut, secara umum ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum sepenuhnya tertangani adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan

- a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana yang belum tuntas tertangani mencapai 836 Unit;
- b) Tingginya tingkat kebutuhan rumah (backlog) yang mencapai 36,99% atau sekitar 328.219 Unit (Tahun 2024);
- c) Masih terdapat sekitar 18,21% Rumah Tidak Layak Huni di Sulawesi Tengah yang membutuhkan penanganan dari pemerintah;
- d) Masih sulitnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mendapatkan akses pembiayaan perumahan melalui regulasi perbankan dalam system pembiayaan perumahan;
- e) Belum tersedianya data rumah yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung sehingga sulit untuk menyajikan indicator kinerja utama akses Rumah Layak Huni terjangkau dan berkelanjutan.

2. Bidang Kawasan permukiman

- a) Luasan permukiman kumuh yang cenderung meningkat.
- b) Kewenangan luasan kawasan kumuh pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak sesuai dengan luas Lokasi SK kawasan kumuh.
- c) Capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah.
- d) Dokumen RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya ditetapkan.
- e) Bertambahnya Rumah tidak layak huni di kabupaten/ kota

3. Bidang PSU dan Sertifikasi

- a) Belum adanya deliniasi kewenangan penanganan PSU permukiman Provinsi dan PSU perumahan Kabupaten/Kota.
- b) Kordinasi dan sinkronisasi program kegiatann PSU permukiman belum optimal dalam penyelenggaraannya.
- c) Tumpang tindih penanganan PSU permukiman dengan perangkat daerah teknis lain.

- d) Belum terlaksananya sertifikasi dan registrasi perorangan atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

4. Bidang Pertanahan

- a) Belum optimalnya pendataan terkait permasalahan Sengketa Tanah Garapan.
- b) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi belum terkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan arahan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 pada point 6 yaitu ***Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan***, hal ini diseleaskan dengan Visi dan Misi Sulawesi Tengah mencerminkan Visi dan Misi Pasangan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2025–2029 dilaksanakan dengan visi yang didasarkan pada kondisi dan potensi hasil pembangunan yang telah dicapai, sehingga dirumuskan “**visi**” sebagai berikut :

“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029 ”

Dalam Visi pembangunan Sulawesi Tengah ini mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan cita-cita seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Dengan menghayati dan mengamalkan makna tersebut diharapkan dapat menjadi perintis dalam mewujudkan tuntutan reformasi yang sudah terangkum dalam visi Sulawesi Tengah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka sesuai dengan misi yang selaras dengan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan dalam menunjang serangkaian yaitu dalam “ **Misi III “ yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.** Dan selanjutnya di selaraskan dalam program **BERANI** yaitu:

1. Berani Lancar :

- ❖ Program Pengembangan Perumahan
- ❖ Program Kawasan Permukiman
- ❖ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- ❖ Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Berani Sejahtera :

- ❖ Program Kawasan permukiman

A. Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024 yang saat ini masih digunakan dan dalam telaah renstra dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian yang dalam waktu dengan ini telah selesai di undang-undangkan. Maka dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Menggunakan Telaah Renstra Kementerian PUPR dan akan di sesuaikan pada saat Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Telah selesai. Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai berikut:

1. Renstra meliputi uraian tentang kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, program, sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, keluaran kegiatan, target capaian, serta pendanaan.
2. Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Tujuan dan sasaran strategis adalah salah satunya untuk Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.
3. Sedangkan Indikator Kinerja adalah Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* (%) dan Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%).

Namun selanjut dalam menentukan Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung;
- b. Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan;
- c. Penyelenggaraan Air Minum yang Layak;
- d. Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman;
- f. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni;
- g. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.

Sedangkan dalam rancangan dan rencana sasaran prioritas yang telah ditetapkan dalam renstra kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 berdasarkan kewenangan dan penanganannya adalah sebagai berikut:

1. menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha)
2. Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20% 30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Berdasarkan arahan *UU no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang* maka Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Provinsi adalah Kawasan peruntukan permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional masuk dalam kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Dimana kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan dan permukiman. Menteri yang dimaksud dalam hal ini yaitu Kementerian Permukiman Dan Perumahan Rakyat (Kemenpera). Dalam *UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di Provinsi Sulawesi Tengah agar tercipta keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan antar sektor. RTRW sendiri disusun untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah.

Dalam ***Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang RTRW Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 - 2042*** berisi beberapa strategi terkait pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akan datang. Dalam peraturan tersebut, pengembang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan pada kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan sebagai permukiman yang aman dari bencana alam maupun bencana buatan manusia, sehat, serta tersedia akses untuk kesempatan berusaha. Sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman

- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
- Tidak mengganggu fungsi lindung
- Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah
- Menciptakan kesempatan kerja
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam permukiman perkotaan terdapat beberapa kebijakan dilakukan seperti dengan memelihara, merevitalisasi, rehabilitas, preservasi, restorasi, dan renovasi bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya dan pola tradisional setempat. Selain itu juga terdapat pengendalian proporsi pemanfaatan lahan terbangun dan non terbangun. Sedangkan pada permukiman perdesaan terdapat arahan bagi pemanfaatan ruang untuk permukiman petani, nelayan dengan kepadatan rendah.

Sedangkan Pusat-pusat Pelayanan yang Berdasarkan pada Sebaran Daerah Fungsional Perkotaan dan Perdesaan Kebutuhan perumahan yang terus menerus mengalami peningkatan serta ketersediaan jumlah lahan yang terbatas menjadikan kebutuhan perumahan di pusat kota meluber ke wilayah sekitarnya (*hinterland*). Selain harga lahan di pusat kota yang cenderung melambung, ketersediaan lahan untuk perumahan di wilayah *hinterland* cenderung lebih besar. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan perumahan di wilayah *hinterland* mengalami peningkatan, baik yang dilakukan secara swadaya maupun yang dibangun secara formal oleh developer. Keberadaan kondisi tersebut membutuhkan perhatian, pengawasan, dan pengendalian agar pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan dapat terarah dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perlu memerhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi menitik beratkan pada tiga hal yaitu memiliki arahan dan kebijakan yang sesuai dengan RTRW Provinsi, mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta memiliki cakupan lintas kabupaten/kota. Karena memiliki cakupan lintas kabupaten/kota, maka permasalahan pembangunan dan pengembangan permukiman lintas kabupaten/kota juga menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Dengan demikian identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten kota perlu

mendapatkan perhatian dan kajian di tingkat Provinsi. Permasalahan lintas kabupaten/kota muncul karena adanya perkembangan kota dan wilayah seperti pada fenomena di atas. Sehingga menyebabkan berkurangnya daya tampung kota dalam memenuhi kebutuhan lahan akan perumahan. Permasalahan kesatuan ekologis dalam konteks lingkungan juga menjadi isu strategis lintas kabupaten kota, seperti permasalahan hulu hilir, maupun permasalahan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan perumahan.

Selain memiliki cakupan area lintas kabupaten/kota, wewenang Provinsi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah pada kawasan-kawasan strategis. Kawasan tersebut perlu diantisipasi perkembangannya karena memiliki potensi yang besar dalam munculnya kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman karena daya tarik yang dimiliki maupun karena adanya perluasan wilayah.

Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi mengacu pada RTRW Provinsi yang telah disusun. Untuk mengetahui alokasi lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman maka perlu membandingkan antara penggunaan lahan eksisting dan penggunaan lahan permukiman yang direncanakan.

2.2.2 Isu Strategis

Tabel 2.11 Teknik Menyimpulkan Isu Startegis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rumah Layak Huni	1. Bidang Perumahan a) Masih tingginya angka rumah tidak layak huni dan backlog perumahan. b) Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 1/2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman serta Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, khususnya terkait kewenangan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum sejalan. c) Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana yang belum tuntas sesuai target. Terbatasnya informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR serta akses terhadap bantuan pembiayaan perumahan	1. Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	1. Layak Huni	1. Rumah Akibat Bencana	1. Rumah Bencana Provinsi	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pmda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni
2. Kawasan Kumuh	2. Bidang Kawasan a) Luasan permukiman kumuh yang cenderung meningkat. b) Kewenangan luasan kawasan kumuh pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak sesuai dengan luas Lokasi SK kawasan kumuh. c) Capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah. d) Dokumen RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya ditetapkan. e) Bertambahnya Rumah tidak layak huni di kabupaten/ kota	2. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	2. kawasan kumuh	2. Delinasi Kawasan Kumuh	2. Delinasi Kawasan Provinsi	2. Persentase Peningkatan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 ha) yang Tertangani

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
3. PSU Permukiman	3. Bidang PSU dan Sertifikasi a) Belum adanya deliniasi kewenangan penanganan PSU permukiman Provinsi dan PSU perumahan Kabupaten/Kota. b) Kordinasi dan sinkronisasi program kegiatan PSU permukiman belum optimal dalam penyelenggaraannya. c) Tumpang tindih penanganan PSU permukiman dengan perangkat daerah teknis lain. d) Belum terlaksananya sertifikasi dan registrasi perorangan atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	3. Pemataan PSU Permukiman	3. psu permukiman	3. Delinasi PSU Permukiman	3. PSU Permukiman Kewenangan Provinsi	3. Persentase kawasan permukiman yang terfasilitasi PSU
4. Pendataan dan sengketa lahan	4. Bidang Pertanian a) Belum optimalnya pendataan terkait permasalahan Sengketa Tanah Garapan. b) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi belum terkoordinasi dengan baik.	4. Sengketa Lahan Tanah Garapan	4. Sengketa Lahan	4. Penyelesaian Sengketa	4. Sengketa Lahan Provinsi	4. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di periode mendatang.

Adapun isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

a. Basis data Perumahan dan Kawasan permukiman yang tersedia masih terbatas;

Data yang sistematis dan terstruktur tentang perumahan dan permukiman yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pemantauan kualitas perumahan dan permukiman penyediaan data yang baik sangatlah penting. Sebab, tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

b. Terbatasnya informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR serta akses tentang bantuan pembiayaan perumahan;

Terbatasnya informasi mengenai perumahan yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan akses bantuan pembiayaan perumahan menjadi masalah yang signifikan. Hal ini mengakibatkan banyak MBR kesulitan memiliki rumah layak, meskipun ada program pemerintah seperti FLPP dan BSPS.

c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana adalah proses menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana, termasuk pembangunan kembali rumah yang rusak atau pembangunan rumah baru, serta rehabilitasi rumah yang rusak ringan hingga sedang. Proses ini melibatkan pendataan kerusakan rumah, pembentukan tim satgas, penyusunan rencana aksi, dan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi.

d. Masih luasnya perumahan dan permukiman kumuh;

Masih banyak perumahan dan permukiman kumuh di Sulawesi tengah rumah tangga masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Penyebab utama meliputi keterbatasan lahan, kurangnya fasilitas pendidikan, dan ketidakpedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dampak negatifnya mencakup berkurangnya ketersediaan air bersih, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan.

e. Masih rendahnya pemukiman yang terlayani dengan PSU yang memadai;

Masih rendahnya permukiman yang terlayani Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai merupakan masalah umum yang dihadapi di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. PSU yang tidak memadai dapat berdampak buruk pada kualitas hidup penghuni, baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun kenyamanan. PSU merupakan kelengkapan fisik

untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

f. Belum teridentifikasinya seluruh kawasan kumuh di wilayah Kabupaten / Kota;

Belum ada batas atau pemetaan yang jelas mengenai wilayah mana yang dianggap sebagai kawasan kumuh. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan perencanaan dan penanganan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di kawasan tersebut.

g. Keterbatasan lahan untuk pembangunan permukiman di perkotaan;

Keterbatasan lahan untuk pembangunan permukiman di perkotaan menjadi masalah utama, Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang cukup menyebabkan berbagai masalah, seperti semakin padatnya permukiman, munculnya permukiman kumuh, dan peningkatan harga perumahan.

h. Sinkronisasi Program PSU;

Sinkronisasi Program PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) bertujuan untuk memastikan semua rencana kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga berjalan sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada. Sinkronisasi ini penting untuk mendukung pengembangan perumahan yang sehat, aman, dan terjangkau.

i. Dokumen RP3KP belum menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah untuk jangka waktu 20 tahun

j. Penyelesaian sengketa tanah garapan.

Penyelesaian sengketa tanah garapan bisa dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (musyawarah, mediasi, konsiliasi). Jika tidak ada kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Secara umum ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum sepenuhnya tertangani adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan

- a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana yang belum tuntas tertangani mencapai 836 Unit;
- b) Tingginya tingkat kebutuhan rumah (backlog) yang mencapai 36,99% atau sekitar 328.219 Unit (Tahun 2024);
- c) Masih terdapat sekitar 18,21% Rumah Tidak Layak Huni di Sulawesi Tengah yang membutuhkan penanganan dari pemerintah;
- d) Masih sulitnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mendapatkan akses pembiayaan perumahan melalui regulasi perbankan dalam system pembiayaan perumahan;
- e) Belum tersedianya data rumah yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung sehingga sulit untuk menyajikan indicator kinerja utama akses Rumah Layak Huni terjangkau dan berkelanjutan.

2. Bidang Kawasan permukiman

- a) Luasan permukiman kumuh yang cenderung meningkat.
- b) Kewenangan luasan kawasan kumuh pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak sesuai dengan luas Lokasi SK kawasan kumuh.
- c) Capaian penanganan kawasan kumuh yang masih rendah.
- d) Dokumen RP3KP Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya ditetapkan.
- e) Bertambahnya Rumah tidak layak huni di kabupaten/ kota

3. Bidang PSU dan Sertifikasi

- a) Belum adanya deliniasi kewenangan penanganan PSU permukiman Provinsi dan PSU perumahan Kabupaten/Kota.
- b) Kordinasi dan sinkronisasi program kegiatan PSU permukiman belum optimal dalam penyelenggaraannya.
- c) Tumpang tindih penanganan PSU permukiman dengan perangkat daerah teknis lain.

- d) Belum terlaksananya sertifikasi dan registrasi perorangan atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

4. Bidang Pertanahan

- a) Belum optimalnya pendataan terkait permasalahan Sengketa Tanah Garapan.
- b) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi belum terkoordinasi dengan baik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Melaksanakan Tugas Program Gubernur Sulawesi Tengah tujuannya adalah ***“Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman”***.

3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, maka dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan provinsi sulawesi tengah merumusan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Hunian Layak
2. Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan

Untuk lebih jelasnya rumusan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada **tabel 3.1** dibawah ini:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	66,32	68,01	69,70	71,39	73,08	74,74
		Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan	Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	35,71	66,67	75,00	80,00	83,33	85,71

3.3 STRATEGI

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran- pemikiran secara konseptual tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu menyusun dan menetapkan strategi dan kebijakan.

a. Perumusan Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang disesuaikan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yaitu **“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”**.

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 yang terkait dengan urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Misi III yaitu: **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor”**

b. Strategi :

a. Bidang Perumahan

- ❖ Melaksanakan penyediaan/rehabilitasi rumah akibat bencana dan terkena relokasi program pemerintah Provinsi

b. Bidang Kawasan Permukiman

- ❖ Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

c. Bidang PSU dan Sertifikasi

- ❖ Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum permukiman

d. Bidang Pertanahan

- ❖ Meningkatkan fasilitasi dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

3.4 ARAH KEBIJAKAN :

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan visi misi Gubernur Sulawesi Tengah Menetapkan arah kebijakan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Bidang Perumahan
 - Melakukan pemuktahiran basis data perumahan dan Kawasan permukiman
 - Melaksanakan penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
 - Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara perumahan dengan se
- b. Bidang Kawasan Permukiman
 - Melaksanakan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh.
 - Melaksanakan Peningkatan Kualitas Terhadap Rumah Tidak Layak Huni
 - Melaksanakan Perencanaan Kawasan Permukiman
- c. Bidang PSU dan Sertifikasi
 - Penyediaan sarana dan utilitas umum permukiman
- d. Bidang Pertanahan
 - Meningkatkan fasilitasi dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI	Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029		
MISI	Misi III yaitu : Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan		
	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Melaksanakan Penyediaan/rehabilitasi rumah akibat bencana dan terkena relokasi program pemerintah provinsi	Melaksanakan penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana Melaksanakan relokasi yang terkena program pemerintah Provinsi Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana Meningkatkan koordinasi dengan pengembang perumahan Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana

VISI	Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029		
MISI	Misi III yaitu : Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan		
	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Melaksanakan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh. Melaksanakan Peningkatan Kualitas Terhadap Rumah Tidak Layak Huni Melaksanakan Perencanaan Kawasan Permukiman
	Bidang PSU dan Sertifikasi		
	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan permukiman	Penyediaan
	Bidang Pertanian		
	Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian sengketa tanah garapan Melaksanakan penatagunaan tanah lintas kabupaten/kota	Melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan Menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan Melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian tanah untuk bangunan pemerintah Pendataan awal dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

Sasaran: Meningkatnya Akses Hunian Layak dan Meningkatnya fasilitas penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Pembangunan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman kumuh
Pembangunan prasarana sarana utilitas Umum permukiman	Pembangunan prasarana sarana utilitas Umum permukiman	Pembangunan prasarana sarana utilitas Umum permukiman	Pembangunan prasarana sarana utilitas Umum permukiman	Pembangunan prasarana sarana utilitas Umum permukiman
Meningkatnya fasilitas dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya fasilitas dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya fasilitas dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya fasilitas dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya fasilitas dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	1. Penyusunan Kajian Disinsentif Pada Rumah Yang Tidak Dimanfaatkan; 2. Identifikasi Lahan Perkotaan Untuk Pembangunan Rumah Susun; 3. Layanan Klinik Rumah Sehat 4. Penyusunan Program Penyediaan Perumahan Dengan Pendekatan Karir Merumah (Housing Career); 5. Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Rp3kp) Daerah Kabupaten/Kota; 6. Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Rp3kp) Provinsi; 7. Peremajaan Permukiman Di Kawasan Kumuh; 8. Penyusunan Roadmap Penanganan Kawasan Kumuh; 9. Penyediaan Dan Pengelolaan Fasilitas Fisik Dasar (Prasarana), Fasilitas Penunjang (Sarana), Dan Fasilitas Pendukung (Utilitas) Di Kawasan Perumahan Dan Permukiman; 10. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditetapkan Pemerintah Sebagai Pedoman Untuk Menyelesaikan Sengketa Tanah.	1. Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem OSS, serta pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Penataan otonomi daerah yang mewujudkan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, kebijakan kerja sama antar multiaktor; 3. Peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); 4. Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik, didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya serta pengembangan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; 5. Meningkatnya fasilitasi dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 6. Percepatan pelaksanaan reforma agraria, sertifikasi tanah menuju system pendaftaran tanah publikasi/stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital; 7. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi; 8. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, termasuk generasi milenial dan generasi Z; 9. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi.	1. Bidang Perumahan - Melaksanakan penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana - fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi - Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana - Meningkatkan koordinasi dengan pengembang perumahan - Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana 2. Bidang Kawasan Permukiman - Melaksanakan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh. - Melaksanakan Peningkatan Kualitas Terhadap Rumah Tidak Layak Huni - Melaksanakan Perencanaan Kawasan Permukiman 3. Bidang PSU dan Sertifikasi - Penyediaan sarana dan utilitas umum permukiman 4. Bidang Pertanian - Meningkatkan fasilitasi dalam pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah merumuskan rencana 5 tahun (2025- 2029) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan program ini berdasarkan atas peran serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan **Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029** Misi III yaitu : **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor”**.

Menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD pada tahun 2025-2029 sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan ***Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023*** di ubah menjadi ***Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Kemendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan infentarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah***, dengan memperhatikan program-program yang menyangkut urusan provinsi sulawesi tengah. Berikut ini program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, antara lain:

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- d. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimun dan Tanah Absentee
- e. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- f. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- g. Program Penatagunaan Tanah

4.2 Uraian Kegiatan

Berdasarkan Programn dan Kegiatan pada perangkat daerah dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi sulawesi tengah sudah di tetapkan sesuai dengan ***Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Kemendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan infentarisasi pemuktahiran klasifikasi,***

kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - b. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi.
 - c. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - d. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program
3. Program Kawasan Permukiman terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penataan kawasan permukiman dengan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha
 - b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah (lima belas) ha
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Urusan penyelenggaraan psu permukiman
5. Program Bidang Pertanahan terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Izin Lokasi
 - b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - c. program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee
 - d. program penatagunaan tanah

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman		-	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	RPJMD
		1. Meningkatnya Akses Hunian Layak			1. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		58,09 %	66,32 %	68,01 %	69,70 %	71,39 %	73,08 %	74,74 %	KADIS
			1.1 Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Meningkatnya Fasilitasi rumah Layak Huni bagi warga yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah		1.1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitasi rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (LAYANAN 1 dan 2)								Kabid
			1.1 Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana		1.1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (LAYANAN 1)	91,20	91,68	92,28	94,21	96,14	98,07	100	
				1.1.1 Tersedianya Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	38 UNIT	48 unit	60 unit	194 unit	194 unit	194 unit	194 unit	
				2.1.1 Tersedianya Data Rumah Tangga Penerima Bantuan dan Pembiayaan Rumah	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional
					Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50 orang	0	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	
				3.1.1 Tersedianya dokumen serah terima bagi korban bencana atau relokasi	Jumlah Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1.2 Meningkatkan Fasilitas rumah Layak Huni bagi warga yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah		1.2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (LAYANAN 2)	0,00	0	16,67	33,33	50,00	66,67	100	Kabid
				1.2.1 Tersedianya data penerima rumah yang akan di Rehabilitasi bagi korban bencana dan lokasi relokasi	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional
					Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	0	1 dokumen	3 dokumen	0	0	0	0	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	2	0	1 dokumen					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				1.2.2 Tersedianya data rumah tangga yang akan di rehabilitasi dan relokasi	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	
				1.2.3 Tersedianya rumah khusus yang akan dibangun bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi				25 RT	25 RT	25 RT	25 RT	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi			50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100 unit	
				1.2.4 Tersedianya data serah terima bagi korban bencana atau masyarakat	Jumlah Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				yang terkena relokasi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
					Persentase Peningkatan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 ha) yang Tertangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,89%	1,66%	3,58%	5,76%	8,21%	10,93 %	13,91 %	KABID KAWAS AN
					Jumlah laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Te rlegalisasi	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Orang Yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	
			2. 1 Meningkatnya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 ha) yang Tertangani	2.1.1 Tersedia dokumen penataan kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha										

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
				2.1.2 Tertanganinya Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha		-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai Unit Rumah dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		50 Unit	100 Unit	150 Unit	154 Unit	158 Unit	302 Unit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh deng Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		0,5 Ha	1 Ha	1,3 Ha	1,3 Ha	1,3 Ha	3,0 Ha	REVISI TARGET NYA
					Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh deng Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		1 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha	3 Ha	5 Ha	REVISI TARGET NYA
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15(LimaBelas)Ha yang Dimukimkan Kembali	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15 (LimaBelas)Ha		-	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	REVISI TARGET NYA
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas10(Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas10(Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima		-	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	50 Unit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						Belas) Ha								
					Persentase kawasan permukiman yang terfasilitasi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15,03	16,02	16,52	17,01	17,51	18,00	18,50	KABID PSU
					Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Fungsional
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	6 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	9 Dokumen	11 Dokumen	13 Dokumen	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang Umum Permukiman	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	304 Lokasi	0	3 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	10 Lokasi	
			4.1 Meningkatnya PSU kawasan permukiman	4.1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Peningkatan Penyediaan PSU Permukiman										
				4.1.2 Terfasilitasinya Perbaikan PSU Permukiman										

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	-	-	3 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	10 Lokasi	
				4.1.3 Tersedianya PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana,Sarana,dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	304 Lokasi	20 Lokasi	36 Lokasi	15 Lokasi	20 Lokasi	25 Lokasi	34 Lokasi	
		2. Meningkatnya fasilitasi dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah			Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi		35,71	46,43	66,67	75,00	80,00	83,33	85,71	KADIS
		2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	KABID PERTANAHAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				2.1.1 Terselenggaraan ya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	
					Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	1 dokum en	
					Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	-	-	1 Surat	1 Surat	1 Surat	1 Surat	1 Surat	
					Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	1	1	1	1	1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			2.2 Meningkatnya Penyelesaian Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan		Persentase Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yang Terfasilitasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	35,71	46,63	66,67	75,00	80,00	83,33	85,71	KABID PERTANAHAN
				Terfasilitasinya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28 Dokumen	15 Dokumen	20 Dokumen	25 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Berita Acara	10 Berita Acara	15 Berita Acara	20 Berita Acara	25 Berita Acara	30 Berita Acara	35 Berita Acara	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	-	2 Berita Acara	2 Berita Acara	3 Berita Acara	4 Berita Acara	5 Berita Acara	6 Berita Acara	
					PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	KABID PERTANAHAN
					Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
				Terselenggaranya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
					Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	
					Persentase Redistribusi Tanah yang Terinventarisasi	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	79,79	100	100	100	100	100	100	KABID PERTANAHAN
			2.4 Meningkatnya Redistribusi Tanah yang Terinventarisasi	Tersusunnya data untuk kebutuhan Redistribusi Tanah	Jumlah Laporan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	
					Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi		1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	
					Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria		10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	10 Berita Acara	
					Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	13 Berita Acara	13 Berita Acara	13 Berita Acara	13 Berita Acara	13 Berita Acara	13 Berita Acara	
			2.5 Meningkatnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas		Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah yang Tersusun	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	KABID PERTANAHAN
				Tersusunnya Dokumen Penatagunaan Tanah	Jumlah Laporan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
			2.6 Meningkatkan Legalitas Hukum Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat		Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	KABID PERTANAHAN
					Jumlah Laporan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
				Terinventarisasi nya Tanah Ulayat										

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Gubernur	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	-	-	1	1	1	1	1	
					Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Tersusunnya Dokumen Peningkatan Nilai Sakip Perangkat Daerah PERKIMTAN	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah		1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	
					Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang / Bulan	138 Orang / Bulan	138 Orang / Bulan	138 Orang / Bulan	138 Orang / Bulan	138 Orang / Bulan	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					JumlahDokumenHasilKo ordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD		1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	
					JumlahDokumenBahanT anggapanPemeriksaand anTindakLanjutPemeriks aan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	
				Terwujudnya Birokrasi Yang efisien, Efektif, dan Akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terlaksananya Administrasi Umum Yang Efektif dan Efisien Perangkat Daerah					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	
					Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseli ne 2024	TARGET						Keteran gan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
				Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
				Terjaganya Fungsi dan Ketersediaan Aset Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Baseline 2024	TARGET						Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN/Ou tput	INDIKATOR/OUTCO ME/OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ketera ngan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	77,61	199.304.520.395	78,61	175.835.111.440	79,61	188.704.280.180	80,61	203.104.652.805	81,61	268.778.241.939	RPJMD
	1. Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	58,09%	68,01%	180.875.821.728	69,70%	156.081.128.826	71,39 %	169.240.000.000	73,08 %	183.140.000.000	74,74 %	248.580.000.000	KADIS
PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN (LAYANAN 1 dan 2)	1.1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda Provinsi yang memperoleh Fasiltasi rumah layak huni			47.400.000.000		70.880.000.000		70.930.000.000		70.930.000.000		81.880.000.000	Kabid
PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN (LAYANAN 1)	1.1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	91,20	92,28	17.600.000.000,00	94,21	53.780.000.000,00	96,14	53.780.000.000,00	98,07	53.780.000.000,00	100	53.780.000.000,00	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Laporan	1 Lapora n	16.200.000.000	1 Lapora n	52.380.000.000	1 Lapora n	52.380.000.000	1 Lapora n	52.380.000.000	1 Lapora n	52.380.000.000	Fungsi onal

Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	38 UNIT	60 unit	16.200.000.000	194 unit	52.380.000.000	194 unit	52.380.000.000	194 unit	52.380.000.000	194 unit	52.380.000.000	- Untuk Rumah @ 230.000.000+ PSU@ 40.000.000 - Total Rumah 836 Unit - Total Anggaran 225.720.000.000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	1 Laporan	800.000.000,00	1 Laporan	800.000.000,00	1 Laporan	800.000.000,00	1 Laporan	800.000.000,00	Fungsional
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000,00	1 dokumen	500.000.000,00	1 dokumen	500.000.000,00	1 dokumen	500.000.000,00	1 dokumen	500.000.000,00	
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50 orang	50 orang	300.000.000,00	50 orang	300.000.000,00	50 orang	300.000.000,00	50 orang	300.000.000,00	50 orang	300.000.000,00	
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	600.000.000,00	Fungsional

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan		1 laporan	500.000.000,00	1 laporan	500.000.000,00	1 laporan	500.000.000,00	1 laporan	500.000.000,00	1 laporan	500.000.000,00	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi		1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (LAYANAN 2)	1.2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitas rumah layak huni	0,00	16,67	29.800.000.000,00	33,33	17.100.000.000,00	50,00	17.150.000.000,00	66,67	17.150.000.000,00	100	28.100.000.000,00	Kabid
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1 Laporan	2.350.000.000,00	1 Laporan	550.000.000,00	1 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	600.000.000,00	1 Laporan	650.000.000,00	Fungsional
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0	1 dokumen	350.000.000,00	1 dokumen	350.000.000,00	1 dokumen	400.000.000,00	1 dokumen	400.000.000,00	1 dokumen	450.000.000,00	
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	0	3 dokumen	1.200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	0	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	200.000.000,00	

Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	2	1 dokumen	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	Fungsional
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		5 orang	100.000.000,00	5 orang	100.000.000,00	5 orang	100.000.000,00	5 orang	100.000.000,00	5 orang	100.000.000,00	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1 Laporan	27.250.000.000	1 Laporan	16.350.000.000	1 Laporan	16.350.000.000	1 Laporan	16.350.000.000	1 Laporan	27.250.000.000	Fungsional
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah			5.450.000.000	25 RT	5.450.000.000	25 RT	5.450.000.000	25 RT	5.450.000.000	25 RT	5.450.000.000	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		100 unit	21.800.000.000	50 unit	10.900.000.000	50 unit	10.900.000.000	50 unit	10.900.000.000	100 unit	21.800.000.000	- Total Rumah 350 Unit - Untuk Rumah @178.000.000 + PSU@40.000.000 - Total Anggaran 76.300.000.000

Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	Fungsional
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 ha) yang Tertangani	0,89%	3,58%	30.260.000.000	5,76%	28.710.000.000	8,21%	29.010.000.000	10,93 %	29.210.000.000	13,91 %	51.000.000.000	KABID KAWASAN
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		1 Laporan	5.700.000.000	1 Laporan	3.900.000.000	1 Laporan	3.900.000.000	1 Laporan	3.900.000.000	1 Laporan	3.900.000.000	Fungsional
Penyusunan/R eview/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi		6 Dokumen	5.300.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	

Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya a Permukiman Kumuh	Jumlah Orang Yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	
Pembangunan/ Pengembangan /Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara		1 Sistem Informasi	50.000.000	1 Sistem Informasi	50.000.000	1 Sistem Informasi	50.000.000	1 Sistem Informasi	50.000.000	1 Sistem Informasi	50.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	1 Laporan	24.560.000.000	1 Laporan	24.810.000.000	1 Laporan	25.110.000.000	1 Laporan	25.310.000.000	1 Laporan	47.100.000.000	Fungsional

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha		1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas10(Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah15 (LimaBelas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas10(Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai Unit Rumah dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		100 Unit	5.500.000.000	150 Unit	7.500.000.000	154 Unit	7.700.000.000	158 Unit	7.900.000.000	302 Unit	15.100.000.000	- Total Perbaikan Rumah 2463 Unit - Untuk Perbaikan Rumah @50.000.000 - Total Anggaran 123.15

													0.000.000
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan		1 Ha	2.500.000.000	1,3 Ha	3.250.000.000	1,3 Ha	3.250.000.000	1,3 Ha	3.250.000.000	3,0 Ha	7.500.000.000	
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar		3,8	10.000.000.000	3 Ha	7.500.000.000	3 Ha	7.500.000.000	3 Ha	7.500.000.000	5 Ha	12.500.000.000	
Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15(LimaBelas)Ha yang Dimukimkan Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15(LimaBelas)Ha yang Dimukimkan Kembali		1 Ha	2.700.000.000	1 Ha	2.700.000.000	1 Ha	2.800.000.000	1 Ha	2.800.000.000	1 Ha	2.800.000.000	

Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas10(Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas10(Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha		20 Unit	3.560.000.000	20 Unit	3.560.000.000	20 Unit	3.560.000.000	20 Unit	3.560.000.000	50 Unit	8.900.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan permukiman yang terfasilitasi PSU	15,03	16,52	103.215.821.728	17,01	56.491.128.826	17,51	69.300.000.000	18,00	83.000.000.000	18,50	115.700.000.000	KABID PSU
Urusan Penyelenggara n PSU Permukiman	Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	103.215.821.728	1 Laporan	56.491.128.826	1 Laporan	69.300.000.000	1 Laporan	83.000.000.000	1 Laporan	115.700.000.000	Fungsio nal
Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	6 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000.000	7 Dokumen	4.200.000.000	9 Dokumen	5.400.000.000	11 Dokumen	6.600.000.000	13 Dokumen	7.800.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	13 Laporan	13 Laporan	200.000.000	13 Laporan	200.000.000	13 Laporan	200.000.000	13 Laporan	200.000.000	13 Laporan	200.000.000	
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari PengembangUmum Permukiman	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	

Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum pemukiman	Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	304 Lokasi	3 Lokasi	2.250.000.000	6 Lokasi	4.500.000.000	6 Lokasi	4.500.000.000	6 Lokasi	4.500.000.000	10 Lokasi	7.500.000.000	
Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	-	3 Lokasi	4.500.000.000	6 Lokasi	9.000.000.000	6 Lokasi	9.000.000.000	6 Lokasi	9.000.000.000	10 Lokasi	15.000.000.000	
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	304 Lokasi	36 Lokasi	90.065.821.728	15 Lokasi	38.391.128.826	20 Lokasi	50.000.000.000	25 Lokasi	62.500.000.000	34 Lokasi	85.000.000.000	
	Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	35,71	66,67	976.600.000	75,00	1.001.800.000	80,00	1.027.000.000	83,33	1.052.200.000	85,71	927.400.000	KADIS
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	KABID PERTANAHAN

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	
Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	-	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	
Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	-	1 Surat	10.000.000,00	1 Surat	10.000.000,00	1 Surat	10.000.000,00	1 Surat	10.000.000,00	1 Surat	10.000.000,00	
Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	-	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan yang Terfasilitasi	35,71	66,67	366.400.000	75,00	391.600.000	80,00	416.800.000	83,33	442.000.000	85,71	317.200.000	KABID PERTANAHAN

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	366.400.000	1 Laporan	391.600.000	1 Laporan	416.800.000	1 Laporan	442.000.000	1 Laporan	317.200.000	
Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28 Dokumen	15 Dokumen	18.000.000,00	20 Dokumen	24.000.000,00	25 Dokumen	30.000.000,00	30 Dokumen	36.000.000,00	35 Dokumen	42.000.000,00	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Berita Acara	10 Berita Acara	296.000.000,00	15 Berita Acara	314.000.000,00	20 Berita Acara	332.000.000,00	25 Berita Acara	350.000.000,00	30 Berita Acara	218.000.000,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	
Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	-	2 Berita Acara	2.400.000,00	3 Berita Acara	3.600.000,00	4 Berita Acara	4.800.000,00	5 Berita Acara	6.000.000,00	6 Berita Acara	7.200.000,00	

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	KABID PERTA NAHAN
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi		1 Lapora n	74.000.000	1 Lapora n	74.000.000	1 Lapora n	74.000.000	1 Lapora n	74.000.000	1 Lapora n	74.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	1 Dokume n	50.000.000	1 Dokume n	50.000.000	1 Dokume n	50.000.000	1 Dokume n	50.000.000	1 Dokume n	50.000.000	
Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	-	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	-	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah yang Terinventarisasi	79,79	100	264.400.000,00	100	264.400.000,00	100	264.400.000,00	100	264.400.000,00	100	264.400.000,00	KABID PERTANAHAN
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Laporan	1 Laporan	264.400.000,00	1 Laporan	264.400.000,00	1 Laporan	264.400.000,00	1 Laporan	264.400.000,00	1 Laporan	264.400.000,00	
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.		1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00	1 Berita Acara	100.000.000,00	
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi		1 Laporan	14.400.000,00	1 Laporan	14.400.000,00	1 Laporan	14.400.000,00	1 Laporan	14.400.000,00	1 Laporan	14.400.000,00	

Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria		13 Berita Acara	50.000.000,00	13 Berita Acara	50.000.000,00	13 Berita Acara	50.000.000,00	13 Berita Acara	50.000.000,00	13 Berita Acara	50.000.000,00	
Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	13 Berita Acara	50.000.000,00	13 Berita Acara	50.000.000,00	13 Berita Acara	50.000.000,00	13 Berita Acara	50.000.000,00	13 Berita Acara	50.000.000,00	
PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Persentase Dokumen Penatagunaan Tanah yang Tersusun	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	KABID PERTANAHAN
Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggara n Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	

PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan	-	100%	46.800.000	100%	46.800.000	100%	46.800.000	100%	46.800.000	100%	46.800.000	KABID PERTA NAHAN
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1 Lapora n	46.800.000	1 Lapora n	46.800.000	1 Lapora n	46.800.000	1 Lapora n	46.800.000	1 Lapora n	46.800.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	
Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Gubernur	-	1 Dokume n	16.800.000,00	1 Dokume n	16.800.000,00	1 Dokume n	16.800.000,00	1 Dokume n	16.800.000,00	1 Dokume n	16.800.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi		100,00 %	17.452.098.667	100,00 %	18.752.182.614	100,00 %	18.437.280.180	100,00 %	18.912.452.805	100,00 %	19.270.841.939	

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	575.000.000	1 Laporan	575.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	1 Data	200.000.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		1 Berita Acara	200.000.000	1 Berita Acara	200.000.000	1 Berita Acara	200.000.000	1 Berita Acara	200.000.000	1 Berita Acara	200.000.000	
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	11.877.098.667	1 Laporan	12.452.182.614	1 Laporan	12.662.280.180	1 Laporan	13.137.452.805	1 Laporan	13.495.841.939	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		138 Orang / Bulan	9.377.098.667	138 Orang / Bulan	9.752.182.614	138 Orang / Bulan	10.162.280.179,86	138 Orang / Bulan	10.637.452.804,79	138 Orang / Bulan	10.995.841.939	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	2.300.000.000	1 Dokumen	2.500.000.000	1 Dokumen	2.300.000.000	1 Dokumen	2.300.000.000	1 Dokumen	2.300.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	100.000.000	1 Paket	300.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	100.000.000	5 Orang	100.000.000	5 Orang	100.000.000	5 Orang	100.000.000	5 Orang	100.000.000	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	850.000.000	1 Laporan	1.350.000.000	1 Laporan	1.350.000.000	1 Laporan	1.350.000.000	1 Laporan	1.350.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	1.650.000.000	1 Laporan	1.650.000.000	1 Laporan	1.350.000.000	1 Laporan	1.350.000.000	1 Laporan	1.350.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	350.000.000	5 Unit	350.000.000	5 Unit	350.000.000	5 Unit	350.000.000	5 Unit	350.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	800.000.000	2 Unit	800.000.000	2 Unit	800.000.000	2 Unit	800.000.000	2 Unit	800.000.000	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	750.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1 Laporan	1 Laporan	1.150.000.000	1 Laporan	1.150.000.000	1 Laporan	1.150.000.000	1 Laporan	1.150.000.000	1 Laporan	1.150.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya		50 Unit	800.000.000	50 Unit	800.000.000	50 Unit	800.000.000	50 Unit	800.000.000	50 Unit	800.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	

Tabel 4.4 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1.	Program Berani Lancar			
	a. Program Pengembangan Perumahan.	a. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Meningkatnya Fasilitas Rumah Layak Huni Bagi Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	a Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 2 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi 3 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 4 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi b Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 2 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan c Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi d Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program	

			1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
	b. Program Kawasan Permukiman	a. Meningkatkan Luas Kawasan KumuhKewenangan Provinsi (10-15 Ha) YangTertangani	a Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 3 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 4 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman b Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha 2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas10(Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah15 (LimaBelas) Ha 3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha 4 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh deng Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha	

		5 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh deng Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha 6 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15 (LimaBelas)Ha 7 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas10(Sepuluh)Ha sampai dengan diBawah 15 (Lima Belas) Ha
c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	a. Meningkatnya PSU Kawasan Permukiman	a Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 1 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman 3 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 4 Operasional dan pemeliharaan prasarana,saranan dan utilitas umum permukiman 5 Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman 6 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman 7 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman
d. Program Bidang Pertanahan	a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	a Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 1 Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 2 Koordinasi Pelaksanaan

92

		d. Meningkatnya Redistribusi Tanah yang Terinventarisasi e. Meningkatnya Penatagunaan Tanah yang berkualitas f. Meningkat Legalitas Hukum Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat	d Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi 4 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria 5 Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi e Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi 3 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi f Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	
--	--	--	---	--

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Akses Hunian Layak	Indeks	66,32%	68,01%	69,70%	71,39%	73,08%	74,74%	
2	Meningkatnya Fasilitas Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Indeks	35,71	66,67	75,00	80,00	83,33	85,71	

Tabel 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
2	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase	66,32	68,01	69,70	71,39	73,08	74,74	
3	Persentase Kasus Sengketa yang Terfasilitasi	Persentase	46,43	66,67	75,00	80,00	83,33	85,71	

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persentase	91,68	92,28	94,21	96,14	98,07	100	
5	Meningkatnya Fasilitas Rumah Layak Huni Bagi Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase	0	16,67	33,33	50,00	66,67	100	
6	Meningkatnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 ha) Yang Tertangani	Persentase	1,66	3,58	5,76	8,21	10,93	13,91	
7	Meningkatnya PSU Kawasan Permukiman	Persentase	16,02	16,52	17,01	17,51	18,00	18,50	
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase	0	100	100	100	100	100	
9	Meningkatnya Penyelesaian Kasus Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Persentase	46,63	66,67	75,00	80,00	83,33	85,71	
10	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persentase	0	100	100	100	100	100	

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Meningkatnya Redistribusi Tanah Yang Terinventarisasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	
12	Meningkatnya Pentagunaan Tanah Yang Berkualitas	Persentase	0	100	100	100	100	100	
13	Meningkatnya Legalitas Hukum Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat	Persentase	0	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029 dan Renstra ini juga memuat arahan penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman, dan Pertanahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan selama periode 2025-2029. Isi Renstra dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang, dan Unit Pelaksana dinas, guna mencapai sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden, Gubernur Sulawesi Tengah dan di Lanjutkan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Renstra Juga telah di salaraskan dengan program pemerintah lainnya seperti :

- ✚ Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kewenangan provinsi sesuai arahan dan petunjuk dalam dokumen ini serta telah di koordinasikan dengan pemda provinsi Sulawesi Tengah sesuai arahan dan petunjuk Inmendagri no 02 tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029
- ✚ Renstra ini juga telah diselaraskan dengan renstra kementerian Perumahan kawasan dan permukiman (PKP) tahun 2025-2029 yang memuat petunjuk dan arahan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.s
- ✚ Renstra ini juga telah di koordinasikan dengan arahan dan petunjuk dalam dokumen APIP pemda provinsi sulawesi tengah tahun sebelumnya sesuai permintaan dari persyaratan dalam membuat renstra provinsi sulawesi tengah.
- ✚ Dokumen renstra ini juga telah di selaraskan dengan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 provinsi sulawesi tengah sebagai arahan dan petunjuk untuk melengkapi program dan kegiatan yang ada di Dinas Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan provinsi sulawesi tengah.

Dokumen Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dalam pengembangan perencanaan, pembangunan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penyelenggaraan perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar stakeholder agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang lebih baik.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang wajib untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.